

Tradisi Arsip Muhammadiyah

The Archival Tradition of Muhammadiyah

Muhammad Ichsan Budi Prabowo¹, Belinda Feronica²

Museum Muhammadiyah¹²

Kompleks Universitas Ahmad Dahlan Kampus 4 Jl. Ahmad Yani (Ring Road Selatan), Tamanan,
Banguntapan, Bantul¹²

muhammad.ichsan@staff.uad.ac.id¹, belindaferonica.2021@student.uny.ac.id²

Abstract

This study presents a historical reflection on the development of Muhammadiyah as a modernist Islamic movement, viewed through the lens of organizational administrative culture over a century, resulting in a valuable archival heritage for the nation. The collaboration between Muhammadiyah's Central Leadership and the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) since 1996 has produced one of the largest archival inventories for a national organization. This interdisciplinary research combines historical methods to examine Muhammadiyah's archival traditions and trace its historical processes, reinforced by significance assessment methods from museum studies to evaluate how historical sources can be leveraged for strategic value. The study aims to: (1) understand the historical process through which Muhammadiyah's administrative traditions generated this archival legacy, and (2) strengthen the partnership between ANRI and Muhammadiyah's Central Leadership to synergize sustainable archival collaboration

Keywords: *Archival Traditions, Muhammadiyah, Archival ANRI*

Abstrak

Kajian ini merupakan sebuah refleksi historis terhadap perkembangan sejarah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis dalam sudut pandang budaya administrasi organisasi selama satu abad yang hasilnya menjadi sebuah khazanah arsip yang berharga bagi bangsa. Proses kerjasama antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Arsip Nasional Republik Indonesia sejak tahun 1996 menghasilkan salah satu inventarisasi arsip terbesar untuk sebuah organisasi kebangsaan. Penelitian interdisipliner ini menggabungkan metode sejarah untuk memahami tradisi kearsipan di Muhammadiyah untuk memahami proses sejarah nya, serta dikuatkan dengan metode signifikansi dalam kajian permuseuman salah satunya untuk menilai bagaimana sumber sejarah dapat dikembangkan pada nilai yang lebih strategis. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk memahami proses historis bagaimana Muhammadiyah dalam tradisi administrasi nya menghasilkan sebuah warisan khazanah arsip. Kemudian proses sejarah ini dapat menjadi bekal penguatan kerjasama antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mensinergikan kerjasama kearsipan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tradisi Arsip, Muhammadiyah, Khazanah ANRI*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammadiyah merupakan gerakan pembaruan Islam yang lahir di

Yogyakarta tahun 1912. Berdirinya organisasi ini bertepatan dengan ketegangan penting di awal abad ke-20, yang menuju pada gejala perubahan bangsa

Indonesia terhadap kolonialisme dengan munculnya gagasan dan gerakan nasionalisme. Yogyakarta pada masa itu menjadi Ibukota Kesultanan yang tengah mengalami kemajuan signifikan modernisasi berkat keberhasilan industrialisasi.

Keterkaitan antar situasi dan konteks sosial menjadi sebuah elemen penting dalam pendirian organisasi ini, bahkan dalam beberapa aspek melampaui dari sekedar pengejawantahan dari pemikiran sang pendiri, yaitu K.H. Ahmad Dahlan. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah tentu bukanlah perhimpunan elit priyayi maupun birokrat tradisional, namun latar belakang para pendirinya dari kultur birokrasi Jawa ditambah dengan gairah kemajuan pendidikan Barat. Hal ini menjadi unsur penting untuk memahami perilaku Muhammadiyah tidak sekedar sebagai gerakan keagamaan namun sebagai modern yang pada konteksnya akan mewarnai modernisasi kehidupan beragama di Indonesia, khususnya dalam aspek kesadaran terhadap sebuah birokrasi rasional yang menjadi kunci penting bagi perubahan sosial (Thomas Lindblad, 1998).

Alih-alih tumbuh dari ikatan murid dan guru semata, para pendiri Muhammadiyah juga tumbuh dari relasi

pertemanan dan jaringan priyayi. Hal ini kemudian dapat ditemukan dari nama-nama para pengurus pada masa awal yang juga diisi oleh para birokrat non-kalangansantri, ditambah hampir semua pengurus memiliki gelar kebangsawanan penghulu sebagai aparat keagamaan dari Keraton Yogyakarta. Ikatan Muhammadiyah dan pengambilan perilaku sebagai gerakan modern erat kaitannya dengan gerakan Boedi Oetomo. Beberapa penulis terdahulu seperti Munir Mulkan, James Peacock, dan Alwi Shihab, berpandangan jika alasan keterlibatan para perintis Muhammadiyah untuk ke dalam Boedi Oetomo adalah untuk menguatkan Islam di kalangan organisasi tersebut atau sekedar memastikan kaum santri di dalamnya. Bertolak dari pandangan tersebut secara kritis Najib Burhani menunjukkan sumber yang lebih kredibel dan logis. Ia menyatakan jika berangkat dari memoar H. Soedja' diketahui jika keterlibatan para pendiri Muhammadiyah ke dalam tubuh Boedi Oetomo murni dimotivasi atas kesamaan pandangan dan kesepakatan atas gagasan serta cara kerja gerakan tersebut (A. Najib Burhani, 2016).

Dalam catatan H. Soedja' diketahui sebelum berdirinya Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan benar-benar aktif dalam badan Boedi Oetomo sebagai pengurus dan sekretaris Boedi Oetomo, Mas

Joyosumarto, sejak 1909 dekat dengan Ahmad Dahlan yang nantinya membentuk pendirian perkumpulan Muhammadiyah.

Upaya dan keterlibatan Muhammadiyah untuk mengatur dirinya sebagai gerakan modern, telah serius dari awal pendiriannya dengan membentuk sebuah struktur yang jelas disertai dengan *Statuten* dan *Algemeen* (Bataviaasch nieuwsblad, 1913). Proses formalisasi Muhammadiyah juga ditunjukkan dengan hubungan yang semakin intensif bersama Boesi Oetomo untuk memperkenalkan organisasinya, serta melakukan agitasi agar muslim di Yogyakarta dapat turut bergabung dengan gerakan ini (De expres, 1912).

Pada lima tahun pertamanya, Muhammadiyah telah mendapatkan *statuten* yang jelas yang secara berkala mempengaruhi gerak organisasi ini. Secara berurutan pada tahun 1912, 1914, hingga nanti tahun 1921, kemudian pada puncaknya di tahun 1932, Muhammadiyah telah memperoleh izin penuh untuk menyebarkan gerakannya di seluruh Hindia Belanda. Laju pertumbuhan organisasi ini nantinya akan membuat struktur Muhammadiyah semakin kompleks untuk mendukung besarnya organisasi. Secara bertahap, Muhammadiyah mengatur kerja-kerja sosial keagamaannya dalam satuan

yang disebut *Bahagian* yang terdiri dari aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan (Alfian, 2019).

Proses perkembangan tersebut nampak dapat teramati dalam khasanah arsip yang ditemukan selama penelitian ini. Diketahui jika dari tahun ke tahun, pada setiap laporan kongres atau permusyawaratan tahunan Muhammadiyah, organisasi ini menunjukkan bentuk yang semakin kompleks dan semakin disiplin dalam perilaku administrasi dan birokratisasi. Hal ini ditunjukkan dengan kewajiban bagi setiap cabang di seluruh Hindia Belanda untuk menyusun dan mengirimkan *verslag* atau laporan organisasi kepada tingkat pusat yaitu *hoofdbestuur*. Selain dari laporan resmi yang nantinya menjadi arsip organisasi, Muhammadiyah juga memiliki tanggung jawab pada publik dengan menerbitkan laporan organisasinya ke media massa, baik yang dikelola Muhammadiyah maupun media umum (M. Yuanda Zara, 2019).

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka kajian ini akan menekankan aspek sejarah dari perilaku administrasi dalam tubuh Muhammadiyah. Pada unsur budaya tertib organisasi dan kaderisasi kesekretariatan untuk melihat latar belakang tradisi kearsipan yang dimaksud, kemudian untuk menemukan refleksi

kondisi hari ini akan dikaji bagaimana kekayaan khasanah kearsipan tersebut menjadi sebuah karya yang bermanfaat serta dinamika kerjasama dengan lembaga arsip.

B. Tujuan

Kajian ini ditujukan untuk memahami tradisi administrasi Muhammadiyah dalam rentang sejarah nya dengan metode historis. Hingga nanti nya menghasilkan kegiatan dokumentasi yang kelak warisan khazanah kearsipan. Dipahaminya proses sejarah tersebut kemudian dapat menjadi sebuah refleksi sekaligus referensi pengambilan kebijakan kerjasama antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang berkelanjutan dan kontekstual dengan tidak melepaskan pada latar belakang budaya administrasi yang telah berkembang di lingkungan persyarikatan.

METODE

Kajian ini merupakan penelitian sejarah dengan metode sejarah kritis yang terdiri dari tahapan; pencarian topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Untuk menguatkan metode tersebut maka

pendekatan kearsipan juga digunakan untuk melihat bagaimana arsip dan hasil nya menjadi sebuah bahan pengembangan ilmu pengetahuan dengan lebih lanjut, hal ini merupakan warisan dari Mona Lohanda berpandangan jika arsip yang telah merekam proses sejarah manusia dan perilakunya dapat memberikan gambaran pada perkembangan masyarakat serta menjadi kunci penting dalam pengembangan ilmu sosial (Mona Lohanda, 2011) sehingga penarikan kesimpulan terhadap sebuah fenomena tidak hanya ditunjang pada hipotesis teoritis.

Proses pemilihan topik dalam penelitian ini merupakan sebuah refleksi dari penulis sebagai seorang sejarawan akademik sekaligus kurator Museum. Dalam beberapa tahun terakhir penulis bekerja dengan arsip Muhammadiyah dalam rentang waktu yang panjang untuk keperluan kajian historis, selain itu penulis juga terlibat dalam beberapa perumusan kerjasama antara Muhammadiyah dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sehingga kajian ini merupakan bentuk reflektif dan tinjauan kritis berangkat dari pengalaman tersebut.

Proses heuristik dalam kajian ini dilakukan berbekal wawasan khasanah arsip Muhammadiyah yang telah menjadi sebuah dokumen inventarisasi oleh Arsip

Nasional Republik Indonesia (ANRI, 2018). Untuk menguatkan kajian yang ada, penulis juga memanfaatkan publikasi berkala berupa *Verslag*, *Boeah Congres*, dan koleksi terbitan *official organ* yaitu Suara Muhammadiyah yang tersimpan di Perpustakaan Nasional serta koleksi Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah ditunjang koleksi pribadi.

Proses kritik dan interpretasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melihat dan membandingkan khasanah arsip yang ada serta karya-karya sejarah yang telah dihasilkan sebelumnya. Akhir dari penelitian ini merupakan sebuah kajian untuk merefleksikan proses tradisi kearsipan Muhammadiyah dalam rentang waktu sejarah pada aspek budaya organisasi di masa lalu dan masa kini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan memahami berbagai teori yang relevan dengan arsip hidup seni pertunjukan Jawa. Informasi dari berbagai bahan pustaka dianalisis dengan melakukan telaah kritis dan mendalam berdasarkan proposisi dan gagasan yang dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Budaya Tertib Organisasi Rekaman Melalui *Verslag*

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah sadar jika kejelasan peraturan baik dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga serta pengakuan resmi dari pemerintah kolonial menjadi sebuah aspek yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini menjadi sebuah bukti jika kesadaran terhadap sebuah legalitas menjadi landasan yang tidak akan ditinggalkan. Dalam anggaran dasarnya di tahun pada 1912, Muhammadiyah awalnya membagi aturannya dalam 12 *artikelen*. Secara berurutan mengatur; Nama dan kedudukan, maksud dan tujuan, bentuk gerakan, keanggotaan, kepengurusan, musyawarah, cabang yang masih terbatas di Yogyakarta, kebutuhan operasional, keuangan, perubahan statute, batas minimal organisasi, serta hak dan kewajiban anggota dan organisasi kepada masyarakat dan pemerintah.

Legalitas dalam anggaran dasar organisasi ini baru kemudian disahkan oleh pemerintah kolonial melalui *Gouvernementsbesluit* 22 Agustus 1914 No. 81. Bentuk batang tubuh dan isi dari anggaran dasar ini jika dibandingkan dengan organisasi sejenis pada masa itu memiliki kecenderungan untuk merujuk

pada model yang telah digunakan oleh Boedi Oetomo yang dengan detail mengatur tujuan azas organisasi dan batas awal untuk organisasi ini berdiri.

Sebuah titik penting telah disadari muncul dalam anggaran dasar Muhammadiyah sejak masa awal pada yang tertulis pada astikelan/pasal kedua yang berbunyi”

Artikelen 2

Maka perhimpunan itu maksudnya:

1. Menyebarkan pengajaran Igama (agama) Kanjeng Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk bumiputra di dalam residensi Yogyakarta dan
2. memajukan hal igama (agama) kepada anggauta-anggaunya.

Dalam keterangan diatas telah nampak jika kemajuan menjadi sebuah komitmen awal sejak berdirinya organisasi ini, meskipun pada awal perkembangan di tahun 1912 pembatasan pada persebaran Muhammadiyah masih sebatas Yogyakarta dalam lingkup karesidenan nya.

Perubahan secara signifikan kemudian terjadi pada tahun 1921 saat Muhammadiyah dapat menyebar ke seluruh Hindia Belanda, hal ini menjadi penting kemudian jika dilihat dalam dua aspek mendasar yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pada aspek internal, dilihat dari

perkembangan Muhammadiyah pada satu dekade pertamanya yaitu keberhasilan pembentukan jaringan dan korespondensi yang dilakukan K.H. Ahmad Dahlan pada beberapa kota penting seperti Surakarta, Surabaya, Cirebon, Garut Jawa Barat dan berbagai tempat lain yang secara langsung memperkenalkan model dan gagasan Muhammadiyah (M.T. Arifin, 2016). Hal ini menjadikan Muhammadiyah telah dapat diterima oleh tokoh-tokoh pergerakan dan pembaharuan Islam yang lain untuk dapat berafiliasi dengan Muhammadiyah. Selain itu sebelum tahun 1920, beberapa tempat di Yogyakarta telah berdiri sekolah Muhammadiyah pada tingkatan dasar dan menengah yang menjadi magnet bagi kaum muda untuk menempuh pendidikan sekaligus mengenal Muhammadiyah, kemudian nantinya mereka akan menjadi penyebar dari Muhammadiyah di daerahnya masing-masing.

Perkembangan cabang Muhammadiyah secara signifikan terus tumbuh bersamaan dengan menguatnya legalitas organisasi ini untuk terus dapat membuka cabangnya di seluruh Hindia Belanda. Sebagai sebuah organisasi yang telah memiliki cabang pada berbagai wilayah, maka mutlak diselenggarakan sebuah pertemuan tahunan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan dari

setiap cabang dan pekerjaan pada tingkat pusat pada sebuah forum tahunan. Aktivitas inilah yang nantinya akan menghasilkan dokumentasi verslag.

Dokumen verslag dalam tiga dekade pertama Muhammadiyah terus berkembang seiring dengan berkembangnya bidang amal usaha pada aspek kesehatan, pendidikan, kepastakaan, dan keagamaan. Selain itu, perkembangan juga meliputi sayap-sayap organisasi yang bergerak pada bidang kepemudaan melalui Hizbul Wathan, Aisiyyah, dan Nasyyatul Aisiyyah, serta gerakan pelajar melalui *Siswo Praya*. Kedua komponen tersebut kemudian akan berlaku umum dari tingkat pusat hingga tingkat cabang, sehingga dokumen asli yang dilakukan Muhammadiyah dalam suatu periode telah terekam dengan terstruktur dan masif. Mengamati perkembangan verslag Muhammadiyah dapat dilihat dari verslag tahun pertama setelah Muhammadiyah dapat membuka cabang di luar Yogyakarta, yaitu pada verslag tahun 1922.



Gambar 1. Tampak Muka Verslag Muhammadiyah.

Dokumen diatas menunjukkan struktur daftar verslag yang berlaku di seluruh lapisan persyarikatan. Unsur-unsur dalam verslag ini, secara berurutan terdiri dari laporan perkumpulan persyarikatan tahunan.

1. Perkompoelan perserikatan tahoenan. Membahas seputar tata organisasi dan jalannya proses kongres hingga terpilihnya ketua serta.....
2. Laporan Tjabang Moehammadijah. Memuat detail laporan kuantitatif pada setiap cabang Muhammadiyah di setiap cabang karesidenan. Dalam verslag 1922, diketahui jika Muhammadiyah telah tersebar di 11 wilayah, yaitu Srandakan, Blora, Surabaya, Imogiri, Kepanjen, Surakarta, Garut, Batavia, Purwokerto, Pekalongan, dan Pekajangan.
3. Vergadering. Bagian ini menjelaskan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah

yang bersifat koordinasi yang diselenggarakan pada sepanjang tahun tersebut. Pada umumnya vergadering juga berisi agenda antar organisasi saat Muhammadiyah hadir dalam undangan pergerakan yang lain.

4. Hal Soerat. Bagian ini menjadi salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari isi verslag Muhammadiyah. Sebuah kebiasaan unik saat Muhammadiyah secara teratur mencatat dokumentasi persuratan yang mereka lakukan dan mempublikasikan dalam verslag. Adanya bagian ini menjadi kunci penting untuk memahami kultur administrasi yang berlaku sebagai cara alternatif untuk menelusuri arsip yang telah diproduksi.
5. Laporan keuangan. Bagian ini secara terbuka menyampaikan uang masuk dan uang keluar yang dikelola oleh Muhammadiyah, bahagian, serta cabang-cabangnya. Laporan ini juga memuat asal dari perolehan uang, baik melalui derma, usaha, hingga subsidi dari pemerintah.
6. Verslag tjabang-tjabang. Bagian ini merupakan penutup dari verslag yang berisi tentang laporan cabang-cabang dalam menyelenggarakan kegiatannya. Laporan cabang ini memiliki kedudukan penting untuk

penyelenggaraan kongres, karena status aktif atau tidaknya suatu cabang hanya dapat diukur dengan dapat diterimanya verslag ini.

Verslag ini dalam penelusuran yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa tahun terakhir dapat ditemukan di beberapa tempat, diantaranya dalam inventarisasi arsip Muhammadiyah oleh ANRI pada nomor arsip 1802 pada berkas rapat kerja pimpinan April 1922. Sementara pada koleksi ANRI ditemukan dokumen asli dengan tanda tangan pengesahan para *hoofdbestuur*. Ditemukan juga dokumen ini dalam bentuknya sebagai publikasi berkala. Verslag yang telah berbentuk dokumentasi berkala tersebut dapat ditemukan di lantai surat kabar dan majalah lama Perpustakaan Nasional.

Perubahan dan makin kompleksnya isi verslag Muhammadiyah berkembang seiring dengan semakin banyaknya cabang Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Hindia Belanda. Pada tahun 1927, cabang Muhammadiyah telah berkembang 176 cabang yang merata di seluruh pulau-pulau besar Indonesia. Jumlah ini meningkat 10 kali lipat dari beberapa tahun sebelumnya, yang menunjukkan jika Muhammadiyah dapat diterima bagi kaum muslim di Indonesia.

Menguatnya cabang-cabang Muhammadiyah kemudian juga diikuti dengan penyebaran budaya tertib administrasi. Hal ini dikarenakan hoofdbestuur menuntut tiap cabang untuk memberikan laporan dan juga mengajarkan model pengelolaan administrasi ini kepada struktur dibawahnya, yaitu Grup dan Gerombolan. Sebuah temuan menarik terdapat pada cabang Muhammadiyah Madiun, cabang ini termasuk yang pertama-tama secara disiplin mengumpulkan verslag-nya kepada hoofdbestuur, kemudian diikuti dengan penyusunan verslag pada tingkat bawah. Dokumen-dokumen pada tingkat bawah tersebut masih cukup banyak ditemukan di beberapa kampung yang menjadi kantong Muhammadiyah Madiun.



Gambar 2. Cover Verslag Muhammadiyah Madien Sedjak Berdirinja sehingga Pengabisan Taoen 1927.

Sebuah analisis menarik jika kita melihat isi dari verslag Muhammadiyah tahun 1927, di mana telah terdapat banyak penambahan yang bersifat administratif untuk melengkapi dokumen ini. Pada verslag ini, selain bertambahnya jumlah cabang ditambahkan juga pembahasan lain yaitu seputar *jajasan* dan perhitungan uang (keuangan) yang telah diatur secara terpisah. Nampaknya pada bagian ini Muhammadiyah telah memulai usahanya dengan tegas memisahkan antara kas keuangan untuk operasional organisasi serta kas yang digunakan dari penghimpunan dana yang diperoleh melalui sumber masyarakat umum dengan cara derma.

Semakin disiplinnya laporan keuangan dalam banyak hal menjadi bukti komitmen Muhammadiyah terhadap pengelolaan keuangan, serta perubahan besar terhadap paradigma baru dalam umat Islam disaat uang yang dikelola oleh sebuah kelompok keagamaan menjadi sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan menjadi hak terbatas dari seorang pemimpin keagamaan.

PERHITUNGAN WANG.

XVI.

Dibawah ini kami terangkan adanya wang yang menjadi roda perputaran yang hidup, agar dapat bekerja tepat untuk memajukan maksudnya. Meskipun kami mengakui perhitungannya ini, tetapi terangnya bahwa kemajemukan Muhammadiyah terlihat dari muncul dan keluarnya wang itu.

Keterangan perhitungan wang yang lebih jelas, telah di-
'omankan oleh masing-masing Tjajang dan Geronolan diter-
puta masing-masing. Dan perhitungan wang Pengeres Besar
telah disajikan didalam Congressnya. Masing-masing Tjajang dan
Geronolan telah mengadakan komite untuk memeriksa kas
itu. Maka hal ini tidak perlu kami uraikan disini.

Mahar Muhammadjah menjaga benar-benar tentang hak
'omannya dan menggunakan sebagaimana mestinya, sehingga
bersih dan dipertajam oleh 'omannya sendiri.

Kas Pengeres Besar atau Tjajang dengan Bahagian-bahagian
nya sampai sekarang ini belum dapat dipertajam dan diatur
menurut hukum 'Peraturan umum' pasal XIV. Karena
banyak pekerjaan dan urusan yang menjumlahkan (standar)
biasa dari sebelum diadakan peraturan (itu). Akan tetapi oleh
Pengeres Besar selalu diusahakan dari sedikit sedikit sehingga
cepat menurut peraturan yang tertera baik dan terpuhnya itu.

Berat Tjajang yang baharu, setelah menjadi satu dan baik; kas
Tjajang itu menjadi kasja Bahagian-bahagian dioga.

Perhitungannya, berupa keluarkan Muhammadiyah tentang hal
wang, sebagaimana yang tertera dibawah ini:

Harta Muhammadiyah di:	Masok.	Keluar.	Sisa.
Djakarta	4 190.58	3 508.93	581.64
Bg. Tabligh	1 927.41	1 703.31	162.09
" Sekolah	57 774.15	57 651.50	122.65
" Taman Pustaka	2 632.75	2 572.55	60.20
" P. K. O.	5 915.36	4 850.13	1 065.23
" Jajasan	1 365.25	1 208.32	156.92
" Hizboel-Wathan	364.15	340.56	23.59
" 'Aisjah	5 731.17	5 178.15	553.02
Sundahan Bg. Tabligh	49.45	29.77	19.68
Bg. Sekolah	70.92	75.64	4.72
" Sekolah H. I. S.	1 123.25	1 087.86	35.39
" Hizboel-Wathan	64.71	44.54	20.17
" 'Aisjah	46.47	27.94	18.53
Koragede	208.54	71.53	137.01
Bg. Tabligh	338.30	318.02	20.28
" Taman Pustaka	50.40	29.55	20.85

Gambar 3. Bab Perhitungan Uang dalam Berita Tahunan Muhammadiyah Tahun 1927

Signifikansi verslag sebagai sebuah khasanah arsip semakin menguat seiring dengan berkembangnya Muhammadiyah seiring dengan meningkatnya arsip yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan bertambahnya cabang dan amal usaha yang dikelola. Disisi lain, persebaran tentang arsip Muhammadiyah mengalami peningkatan setelah keberhasilan institusionalisasi dalam tubuh Muhammadiyah untuk mengembangkan Bahagian Taman Pustaka sebagai ujung tombak publikasi Muhammadiyah.

Setahun setelah berdirinya nampak geliat Bahagian Taman Pustaka, tersebutkan dalam verslag Muhammadiyah tahun 1922-1923 telah dilakukan

perombakan keredaksian dalam Suara Muhammadiyah serta dimulainya usaha menerbitkan karangan pengajaran agama, selain itu fungsi Bahagian Taman Pustaka dan sekaligus Suara Muhammadiyah untuk menanggapi isu di luar organisasi makin dipertajam. Hal ini bersamaan dengan serangan surat kabar Islam Bergerak dan Medan Muslimin atas Muhammadiyah atas perbedaan pendapat dalam menegaskan sikap pada pemerintah kolonial. Pada tahun 1923, Bahagian Taman Pustaka telah berusaha mengkonsolidasikan penulis dan kontributor dari berbagai daerah, dan melakukan usaha penerjemahan buku pengajaran agama Islam ke berbagai bahasa. Tujuan ini bersamaan juga terkait dengan dibukanya 14 cabang resmi Muhammadiyah.

Sebuah tradisi penerbitan baru juga dilahirkan dengan disusunnya almanak tahunan mulai tahun 1924, almanak ini kemudian menjadi tradisi penerbitan terbuka bagi Muhammadiyah untuk me-*resume* kegiatan Muhammadiyah sepanjang tahun tersebut serta opini dari berbagai kontributor ditambah dengan informasi publik seperti pos dan telegram. Sebuah perpustakaan publik akhirnya berhasil diwujudkan oleh Muhammadiyah dengan nama *bibliothek Moehammadijah* atau *Gedoeng Boekoe* yang berada di dua tempat

yaitu pada Gang Kenari, Jalan Kauman dekat kantor *Hoofdbestuur* Muhammadiyah dan pada sebuah sekolah di Kepoeh. Pada awal pendiriannya perpustakaan ini telah memiliki 525 koleksi buku dan kitab keagamaan dengan beragam bahasa yaitu Jawa, Melayu, dan Arab dilakukan juga usaha untuk memperoleh bantuan buku kepada Balai Pustaka guna memperoleh buku-buku pengetahuan umum.

Dari dua fakta tersebut, ditemukan jika peran dokumentasi dalam kegiatan permusyawaratan berupa *verslag* kemudian didukung dengan peran aktif Bahagian Taman Pustaka sebagai kunci meratanya budaya administrasi di lingkungan persyarikatan serta makin terjangkaunya hasil dari produk administrasi tersebut menjadi sebuah produk dokumentasi yang dikonsumsi publik. Produk-produk tersebutlah kini menjadi warisan yang memperkaya khasanah arsip Muhammadiyah di ANRI, Perpustakaan Nasional, bahkan sampai ke daerah.

B. Budaya Tertib Organisasi Rekaman Melalui *Verslag*

Berbeda dengan gerakan Islam yang lain, di mana kedudukan seorang pimpinan bersifat mutlak dan menjadi aktor Tunggal, namun Muhammadiyah memiliki karakter yang sangat berbeda. Kepemimpinan tidak diberikan kepada individu yang Tunggal,

namun kepemimpinan bersifat kolektif melalui peran beberapa orang tidak sebatas pengambilan kebijakan, namun juga para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, kedudukan sekretaris menjadi penting bahkan dalam banyak hal, sekretaris menjadi motor penggerak utama dari kerja organisasi sehari-harinya dengan mengesampingkan sekedar peran simbolik.

Sekretaris dalam beberapa kasus menjadi rantai penghubung dari jalannya organisasi, yaitu estafet pergantian kepemimpinan. Hal tersebut kemudian dalam perspektif Muhammadiyah yang khas, dipandang sebagai sebuah proses alami yang disebut *perkaderan* (Djazman Al-Kindi, 2021). *Perkaderan* menjadi sesuatu yang khas dari Muhammadiyah untuk menjaga performa organisasinya. Proses ini berlangsung secara islamiah, namun juga terstruktur. Memahami bagaimana sekretaris sebagai sebuah proses dari *perkaderan* tidak lepas dari pondasi yang diwariskan oleh H.M. Yunus Anis.

H.M. Yunus Anis merupakan salah seorang sekretaris yang mengalami masa jabatan terpanjang, sejak masa mudanya di tahun 1926 hingga akhir hayatnya di tahun 1971. Ketika H.M. Yunus Anis menjadi Sekretaris Pengurus Besar Muhammadiyah, ia suka berkeliling ke cabang-cabang dan ranting Muhammadiyah baik yang ada di

Pulau Jawa maupun luar Jawa. Selama kunjungan ke berbagai daerah sampai di pelosok-pelosok itu ia dengan mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat. Dengan kecakapannya berkomunikasi dan menarik hati maka di mana-mana ia mendapat sambutan secara meriah. Namanya semakin terkenal di kalangan Muhammadiyah. Ketenaran namanya di setiap daerah itu maka setiap ada kongres Muhammadiyah beliau memperoleh suara terbanyak untuk menjadi pengurus.

Dalam aspek pengkaderan sebagai aspek tradisi yang terbina dari Muhammadiyah dapat dilihat dari bagaimana transfer pengetahuan dan pengkaderan yang terjadi antara H.M. Yunus Anis dan Bakri Sujak, sebagai dua tokoh muda itu. Selama menggerakkan Muhammadiyah animo masyarakat setempat tampak bersemangat, sehingga perkembangan Muhammadiyah cukup menggembarakan. H.M. Yunus Anis mulai merintis sekolah di Alabio itu pada tahun 1936, sedang Bakri Sujak tiba di tempat tersebut dua tahun kemudian Masyarakat Islam di sana mengenal dan dekat dengan H.M. Yunus Anis. Hal ini diceritakan sendiri oleh H. M. Yunus Anis kepada Bakri Sujak waktu terjun secara langsung di tengah-tengah masyarakat Kalimantan.

Ceritera itu dikandung maksud supaya dalam upaya mengembangkan Muhammadiyah dapat mendekati hati rakyat sehingga apa yang diperjuangkan berhasil baik. Apa yang dirintisnya agar dapat dijadikan pelajaran bagi Bakri Sujak untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah.

Bakri Sujak kagum terhadap kepemimpinan dan semangat H.M. Yunus Anis bekerja dan berjuang. Ia sama-sama berasal dari Kauman, Yogyakarta itu mengenang kemampuan H.M. Yunus Anis berpidato yang benar-benar memukau para pendengarnya. Apa yang diucapkan di mimbar dan langsung didengar para jemaah yang besar jumlahnya itu menyentuh hati mereka. Para jemaah yang mengikuti pidato H.M. Yunus Anis tergerak bangkit dan terbuka kesadarannya bahwa cita-cita Muhammadiyah akan berhasil baik didukung semua umat Islam. Upaya membangkitkan semangat semacam ini bukanlah hal yang mudah, tetapi memerlukan kecakapan dan metode tersendiri sebagaimana telah dipraktekkan oleh H.M. Yunus Anis. Bakri Sujak masih terkesan kata-kata Muljadi Djojomartono bahwa H.M. Yunus Anis dalam hal berpidato memiliki kemampuan seperti Bung Karno. Kesan ini menunjukkan betapa hebat kemampuan H.M. Yunus Anis

menggerakkan hati para pendengarnya. Kemampuan yang demikian itu diakui oleh berbagai pihak.

Pondasi yang diletakkan H.M. Yunus Anis sebagai sekretaris kemudian tidak terbatas pada kultur pengkaderan yang diwariskan, namun juga tuntunan administrasi berupa buku pedoman yang mungkin menjadi rintisan dari standarisasi administrasi dan perkantoran di lingkungan Muhammadiyah. Buku ini disusun sejak ia menjadi pimpinan sekretaris hoofdbestuur Muhammadiyah pada tahun 1938 dan terus diperbaharui hingga saat ia menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dari 1959-1962.



Gambar 4. Buku Peladjaran Administrasi Muhammadiyah 1957

Setelah menjadi Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama satu periode, H.M. Yunus Anis kemudian digantikan dengan K.H. Ahmad Badawi. Kemudian, H.M.

Yunus Anis kembali kepada posisinya untuk mengelola di bidang kesekretariatan dan perkantoran di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada masa ini, beliau membentuk sebuah rintisan badan dalam tubuh Muhammadiyah yang bernama DOKRAH (dokumentasi dan sejarah). Badan inilah yang kemudian menata ulang dan melakukan penjilidan terhadap koleksi-koleksi arsip Muhammadiyah, yang berupa besluit untuk mendata cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah. Nantinya, koleksi arsip yang dihimpun oleh H.M. Yunus Anis menjadi kelompok dokumen yang diakuisisi oleh Balai Arsip Daerah Jawa Tengah pada tahun 1990-an

C. Karya dan Tantangan Kearsipan Muhammadiyah di Abad ke-2

Abad ke-2 Muhammadiyah dalam hal ini setelah diselenggarakan Muktamar Muhammadiyah ke-46, menjadi sebuah momen penting untuk merefleksikan kembali dan mereformasi sekaligus merestorasi amal dan gerakan Muhammadiyah selama 100 tahun terakhir. Refleksi dan kesadaran ini juga berpengaruh dalam bidang pengelolaan administrasi di lingkungan Muhammadiyah serta usaha untuk modernisasi tahap kedua untuk mewujudkan persyarikatan yang

lebih profesional (Zuly Qodir, 2012). Dalam aspek lain, dorongan untuk kembali menggiatkan sebuah khittah penting untuk menempatkan kedudukan Muhammadiyah sebagai mitra pemerintah untuk memajukan bangsa juga mempengaruhi visi Muhammadiyah di abad ke-2 ini (Farid Setiawan, 2016).

Komitmen ini kemudian secara kelembagaan ditindaklanjuti dengan beberapa perumusan kebijakan riil dalam modernisasi tingkat lanjut dan pengelolaan organisasi hingga usaha untuk menggiatkan pengembangan dalam bidang kesejarahan, hingga nantinya untuk merumuskan pendirian Museum Muhammadiyah. Dalam aspek hubungannya dengan pemerintah, Muhammadiyah kembali mengatur dan mengelola bentuk-bentuk kerjasama strategis, mulai dari tingkat pusat melalui kementerian dan badan terkait hingga pemerintah daerah melalui dinas dan instansi terkait.

Kerjasama dalam bidang kearsipan menjadi usaha penting yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Berawal dari usaha yang dilakukan oleh Amin Rais sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Rosyad Sholeh dan Jaldan Badawi sebagai sekretaris dan kepala kantor, merintis kerjasama dengan BAD (Badan Arsip Daerah) Jawa Tengah pada tahun 1996

untuk mengakuisisi berkas-berkas arsip Muhammadiyah yang berada di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan berbagai pertimbangan, diantaranya ‘UU No. 43 tentang Kearsipan pasal 19 (2) yang menyatakan bahwa ANRI wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan’, arsip ini kemudian diakuisisi ke ANRI pada tahun 1999.

Kesadaran Muhammadiyah pasca Muktamar abad ke-2 nya meningkat bersamaan dengan pembaharuan bentuk kerjasama bersama pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang kearsipan. Berbekal rintisan kerjasama yang dilakukan di dekade sebelumnya, maka dilakukan MoU antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ANRI tahun 2012, di bawah kepemimpinan Din Syamsudin. MoU ini menghasilkan serangkaian kerjasama di bidang penelitian dari ANRI kepada kantor pengelola Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu, sebuah akuisisi yang penting kembali dilakukan pada pertengahan tahun 2014.

Proses kerjasama ANRI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian kembali dilakukan pada tahun 2014 untuk

mengakuisisi koleksi arsip Muhammadiyah dari kegiatan kesekretariatan di atas tahun 1980. Arsip ini kemudian diolah secara intensif selama beberapa tahun dan ditambah dengan hasil akuisisi tahun 2014, yang menghasilkan sebuah karya penting oleh ANRI yaitu daftar ‘Inventarisasi Arsip Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta 1922-2001’. Katalog inventarisasi ini berhasil dengan sangat baik menghasilkan 4888 nomor arsip yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu 8 kelompok untuk tema fasilitatif dan substantif 23 kelompok. Lahirnya inventarisasi nashkan ini kemudian menjadi titik balik yang luar biasa penting dalam historiografi Muhammadiyah saat arsip nasional berhasil menghimpun seluruh khasanah arsip Muhammadiyah dan merawatnya dengan baik, untuk dapat menjadi sumber utama dalam kepentingan penelitian.

Kerjasama Muhammadiyah dan ANRI kemudian terus dikembangkan, termasuk dalam usaha memajukan pengembangan kearsipan di Indonesia. Momen penting terjadi saat Muhammadiyah turut berkontribusi untuk menyerahkan arsip Penanganan Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2022 ke ANRI. Peristiwa ini menjadi sebuah momen penting untuk Muhammadiyah bekerja

sama dengan ANRI melakukan sebuah bidang baru kearsipan yang terkait dengan tema Covid dan kesehatan. Koleksi arsip Muhammadiyah seputar Covid menjadi salah satu kekayaan penting. Hal ini dikarenakan kelembagaan penanganan bencana dan kesehatan di Muhammadiyah di bawah MPKU (Majelis Pembina Kesehatan Umum) dan MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center), membentuk sebuah lembaga kerja khusus dalam menangani pandemi yang disebut MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center). Khazanah yang diakuisisi tersebut, nantinya akan menjadi sebuah memori penting tentang bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan Islam turut berjuang secara serius dalam penanganan wabah Covid-19 sepanjang tahun 2020-2022.

Serangkaian proses kerjasama antara ANRI dan Muhammadiyah ditambah dengan keberadaan inventarisasi arsip Muhammadiyah, kemudian menjadi sebuah model penting dalam mendirikan Museum Muhammadiyah. ANRI dan koleksi sumber di dalamnya menjadi sebuah modal penting dalam proses penelitian Museum Muhammadiyah sejak tahun 2017. Penulis dan tim yang berlatar belakang jurusan sejarah terlibat aktif dalam penelitian ini dalam beberapa tahun terakhir, mengakui

jika koleksi yang disimpan di ANRI menjadi kunci penting untuk memahami sejarah perkembangan Muhammadiyah untuk keperluan museum. Meskipun demikian, dengan metode signifikansi, dilakukan seleksi agar koleksi yang ada dapat maksimal terekplor untuk keperluan museum, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Roslyn Russell and Kylie Winkworth, 2009). Berangkat dari hal tersebut, maka perlu disadari jika pada kesempatan selanjutnya berbekal dari kekayaan khazanah arsip di ANRI, sebuah kajian khusus terhadap topik ini perlu dilakukan secara mendalam.

Pada Museum Muhammadiyah, koleksi khazanah arsip ANRI berkontribusi hampir lebih dari 35% konten museum, baik dalam tata pameran maupun untuk kepentingan kajian substantif. Salah satu arsip penting yang kemudian menjadi sebuah spot penting khusus di museum yaitu koleksi besluit Muhammadiyah 1914, 1920, dan 1921, merupakan sebuah dokumen penting yang menjadi kunci kelahiran Muhammadiyah.



Gambar 5. Besluit Pendirian dalam Tata Pamer Museum Muhammadiyah

Selain dokumen di atas, sebagai koleksi arsip nasional di luar khazanah arsip Muhammadiyah, namun terkait dengan tema Islam atau juga gerakan sosial keagamaan serta gerakan kebangsaan sejenisnya yang berada dalam inventarisasi *Algemene Secretarie*, *Kolonial Verslag*, dan *Memorie van Overgave* juga menjadi sebuah model penting bagi pembangunan penelitian dan pembangunan Museum Muhammadiyah. Berangkat dari beberapa pengalaman tersebut yang dihasilkan dari keberhasilan kerjasama Muhammadiyah dan ANRI, masih terdapat berbagai tantangan kedepannya sekaligus potensi kerjasama untuk pengalaman lebih lanjut, dalam rangka memajukan modernisasi kesekretariatan dan kearsipan Muhammadiyah di tingkat lanjut serta

menumbuhkan kesadaran arsip kepada warga Muhammadiyah.

Sebuah masalah penting yang ke depan perlu dijawab secara serius oleh Muhammadiyah dan pemerintah dalam bidang kearsipan, yaitu sinkronisasi ke tingkat daerah agar struktur Muhammadiyah pada tatar PWM (Pimpinan Wilayah/Provinsi Muhammadiyah) dan PDM (Pimpinan Daerah/Kabupaten Kota Muhammadiyah) agar dapat bekerjasama dengan dinas atau badan terkait yang mengelola perpustakaan pada tingkat daerah. Selain itu, dari internal Muhammadiyah ketiadaan jurusan yang mendukung pengembangan dan kesadaran arsip, seperti jurusan Ilmu Sejarah dan Kearsipan belum dapat diwujudkan, meskipun perguruan tinggi Muhammadiyah yang berkualitas telah tersebar merata di seluruh Indonesia.

SIMPULAN

Muhammadiyah merupakan organisasi modern yang secara sadar mewariskan tradisi pengelolaan administrasi secara disiplin. Hal ini terjadi dalam jangka waktu panjang dan kemudian kini hasil pekerjaan itu kita warisi sebagai kekayaan khazanah arsip yang merekam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak masa pergerakan nasional hingga hari ini,

khususnya dalam aspek kiprah Muhammadiyah serta umat Islam pada umumnya. Warisan ini kemudian dengan baik kini telah dikelola oleh ANRI bersama Muhammadiyah melalui serangkaian kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka kemajuan pengelolaan arsip dan kesadarannya di Indonesia.

Keberhasilan Muhammadiyah dengan bekerja sama dengan ANRI untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang baik telah menghasilkan berbagai prestasi, mulai dari pengembangan penelitian dan historiografi Muhammadiyah yang terus mengalami perkembangan signifikan selama satu dekade terakhir, serta puncak pentingnya dalam melahirkan Museum Muhammadiyah. Pada masa depan, kerja sama ini perlu terus dikembangkan bersama dengan semakin beragamnya paradigma terkait kesadaran arsip dalam berbagai dimensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflemeen Huishoudelijk Reglement Moehammadijah*, 1922.
- Al Kindi, M. Djazman. (2021). *Ilmu Amaliah Amal Ilmiah: Muhammadiyah sebagai Gerakan Ilmu dan Amal*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Alfian. (2010). *Politik Kaum Modernis: Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*. Jakarta: Al-Wasath.

- ANRI. (2018). *Inventarisasi Arsip Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta 1922-2001*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI.
- Bataviaasch nieuwsblad*, 1913.
- Boeah Congres Moehammadijah*, 1927.
- Burhani, Ahmad Najib. (2016). *Muhammadiyah Jawa*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- De Expres*, 1912.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lindblad, T. (1998). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Lohanda, M. (2011). *Membaca Sumber Menulis Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- M. T. Arifin. (2016). *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, Haedar. (2011). *Muhammadiyah Abad Kedua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Prabowo, Muhammad Ichsan Budi, dkk. (2022). *Panduan Penulisan Sejarah Muhammadiyah: Sebuah Tinjauan Awal*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Qodir, Dzuli, dkk. (2010). *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*. Yogyakarta: Kanisius.
- Russell. R. (2009). *Significance 2.0: A guide to assessing the significance of collections*. Australia: Collections Council.
- Setiawan, Farid. (2016). *Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Semesta Ilmu.
- Statuten Moehammadijah*, 1912, 1914, 1921.
- Verslag Moehammadijah Madioen*, 1927.
- Verslag Moehammadijah*, 1922.
- Yunus Anis, H. M. (1957). *Peladjaran Administrasi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Zara, M. Yuanda. (2019). *Sejarah Seabad Muhammadiyah Jilid 1 1915-1963*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.